REFORMASI BIROKRASI BUTUH PROSES

Ubah Abdi Negara Menjadi Abdi Masyarakat

YOGYA (KR) - DIY telah melakukan reformasi birokrasi dengan mengubah tata pemerintahan dari abdi negara menjadi abdi masyarakat. Guna mewujudkan hal itu, DIY terus mengupayakan kondisi yang penerapan sistem manajemen ASN, pemenuhan kebutuhan talenta dan penguatan kompetensi ASN. Termasuk capaian zero kasus Tipikor dan LHKPN.

Karena paradigma baru ASN DIY saat ini telah berubah dari dilayani menjadi melayani, maka orientasi proses menjadi orientasi hasil, tidak kompeten menjadi kompeten, rumit menjadi sederhana dan koruptif menjadi bersih.

"ASN di lingkungan Pemda DIY ditekankan untuk menjadi abdi yang mengutamakan pelayanan prima pada masyarakat. Budaya Satriya saat ini diusung dalam tata kelola pemerintahan DIY. Satriya sendiri adalah akronim dari selaras, akal budi luhur, teladan, rela dan ikhlas melayani, inovatif, yakin dan percaya diri dan terakhir ahli profesional. Tentunya budaya Satriya tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber pada sosialisasi Permen PANRB No.60/2020, tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN yang diadakan secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kamis (5/11).

Dalam kesempatan itu, Wagub DIY didampingi oleh Kepala BKD DIY Amin Purwani MEc Dev dan Kepala Biro Organisasi DIY YB Jarot Budi Harjo. Menurut Wagub DIY, ASN diharuskan memakai pin Satriya untuk terus mengingat mereka supaya melaksanakan apa yang sudah menjadi keharusan. Satriya juga memuat watak 'sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh dan golong gilig'.

Adapun metode penerapan Satriya ada dua, yaitu keteladanan dan pembiasaan. Dari awal memang pembiasaan ini selalu dilakukan secara berjenjang sesuai rentang tanggungjawab dan ketugasannya. Dimulai dari pimpinan sebagai agen perubahan. Harapannya bisa menjadi role model instansi yang bersangkutan.

"Birokrasi pada dasarnya adalah kolegial. Tidak ada secara individu yang terlihat lebih menonjol dari yang lainnya. Ini sebagai personifikasi watak seorang kesatria yang diharapkan bisa menjadi paradigma atau pemikiran-pemikian yang dilaksanakan ASN DIY," jelas Paku Alam X.

Ditambakan, saat melakukan reformasi birokrasi DIY sempat mengalami kendala. Karena ada berbagai tantangan yang harus dihadapi saat mewujudkan hal itu. Di antaranya adalah penerapan merit system yang tidak serta merta bisa langsung berhasil, pemenuhan kebutuhan talenta sampai tantangan untuk menjadi cyber city guna mendukung digital government. Meski menghadapi banyak tantangan, konsistensi menjadi salah satu yang wajib dilakukan. Karena melalui konsistensi tersebut, perlahan namun pasti, reformasi birokrasi bisa dilaksanakan. Meskipun memerlukan waktu yang tidak sebentar.

"Reformasi birokrasi DIY ini pun telah menghasilkan capaian-capaian yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi DIY. Tujuan utamanya memang adalah untuk melayani masyarakat. Namun, dari hasil totalitas tersebut beberapa penghargaan telah dicapai DIY. Di antaranya adalah meraih AA dalam SAKIP dua tahun berturut-turut dan WTP 10 kali berturut-turut,"terangnya. **(Ria)-f**

PENYULUH KB BERPERAN TEGAKKAN PROKES

Pandemi, Angka Kehamilan Berhasil Dikendalikan

YOGYA (KR) - Angka kehamilan selama masa pandemi Covid-19 di Kota Yogya dinilai berhasil dikendalikan. Selain ada penurunan secara kumulatif, angka kelahiran remaja serta kehamilan tidak diinginkan juga terjadi penurunan antara sebelum pandemi dan setelahnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Yogya Tri Karyadi Riyanto, menyebut angka kehamilan kumulatif hingga Februari atau sebelum pandemi ada 1.118 orang. Sedangkan kumulatif hingga akhir September atau setelah pandemi ada 1.068 orang. "Jika kita rinci lagi untuk kategori kelahiran remaja dan kehamilan tidak diinginkan, sebelum dan sesudah pandemi juga ada perbedaan," urainya, Kamis (5/11).

Riyanto menjabarkan, kehamilan remaja merupakan kategori persalinan karena usia sang ibu di bawah 19 tahun. Penyebabnya pun bisa karena pernikahan dini atau hamil luar nikah karena pergaulan. Sedangkan kehamilan tidak diinginkan atau tidak dikehendaki penyebabnya pun bervariasi. Namun rata-rata karena belum ingin menambah anak atau sudah tidak ingin memiliki akan tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Khusus untuk persalinan remaja, periode Januari hingga Februari atau sebelum pandemi tercatat ada 11 orang. Sehingga rata-rata per bulan sekitar 5-6 kasus. Kemudian hingga September atau setelah pandemi terdapat 28 orang atau rata-rata tiap bulannya sekitar tiga orang. Begitu pula kehamilan tidak diinginkan, hingga Februari ada 44 orang atau rata-rata bulanan 22 orang. Kemudian hingga September ada 169 orang atau rata-rata 18-19 orang per bulan. "Dari angka itu kan bisa dilihat selama pandemi justru angkanya lebih sedikit jika dibandingkan sebelum pandemi," urainya. **(Dhi)-f**

DAMPAK UJI COBA PEDESTRIAN MALIOBORO

Haryadi Pastikan Dengar Semua Masukan

KR-Franz Boedisoekarnanto

Petugas mengarahkan pengendara dalam uji coba pedestrian Malioboro bebas kendaraan bermotor.

YOGYA (KR) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti memastikan sudah mendengar semua masukan terkait dampak uji coba pedestrian Malioboro. Pihaknya saat ini juga tengah melakukan kajian dan akan membeberkan hasilnya pekan depan.

Menurut Haryadi, selama uji coba kendaraan bermotor yang bisa memasuki Malioboro memang hanya terbatas, kecuali untuk armada Trans Jogja serta kendaraan kedaruratan. "Kebijakan ini memang harus didukung semua pihak. Tetapi keramaian pengunjung di sana juga agar tetap terjaga. Semua masukan itu kita dengarkan dan sekarang kita lakukan kajian," tandasnya, Kamis (5/11).

Beberapa masukan tersebut antara lain titik kepadatan arus lalu lintas, kebutuhan kantong parkir hingga dampak kegiatan ekonomi para pelaku di Malioboro. Khusus titik kemacetan yang sekarang ini terjadi karena tidak lepas dari upaya uji coba sehingga pengendara belum terbiasa. Hanya, simpul yang terjadi kemacetan parah seperti di Jalan Letjend Suprapto tetap dibutuhkan rekayasa lanjutan.

Sementara terkait sepinya aktivitas ekonomi seperti yang dikeluhkan sejumlah PKL, tetap menjadi perhatian pemerintah. Akan tetapi rencana pedestrian Malioboro menuju kawasan heritage seharusnya tidak dibanding-bandingkan dengan ekonomi. "Jangan diadu heritage dengan ekonomi, itu kan komplementer. Semua kita kaji karena saya yang paling berkepentingan supaya sosial maju, ekonomi juga maju," urainya.

Menurutnya, pada masa pandemi saat ini kondisi ekonomi secara makro memang sedang terganggu. Upaya pemulihan pun tengah digulirkan secara simultan. Sehingga kajian terkait dampak uji coba pedestrian Malioboro pun akan dikebut. Ditargetkan pekan depan sudah bisa dirumuskan strategi atau solusi yang lebih tepat.

Sementara Ketua Paguyuban Pelukis Perajin dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso, pihaknya saat ini sedang berupaya bangkit usai dilanda pandemi. Akan tetapi uji coba pedestrian Malioboro menurutnya langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi anggotanya. Dirinya bersama komunitas lain bahkan akan mendesak agar uji coba tidak digelar selama dua pekan melainkan cukup lima hari. **(Dhi)-f**

KERJA SAMA BANK BPD DIY DAN AMIKOM

Berikan Pengelolaan Keuangan Hingga Magang bagi Mahasiswa

KR-Istimewa

Kerja sama pembukaan jaringan pelayanan dan penyerahan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi Amikom Yogyakarta.

SLEMAN (KR) - Bank BPD DIY meningkatkan kerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta. Khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, pembayaran akademik, payroll karyawan. Kerja sama ini ditingkatkan dengan membuka layanan jaringan pelayanan Bank BPD DIY di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta.

Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Senopati, Sumarno menerangkan, kerja sama antara Bank BPD DIY dan Universitas Amikom ini diharapkan bisa terus terjalin dan semakin berkembang kedepannya. Menurut Sumarno, kerja sama yang dijalin tidak hanya dalam hal pengelolaan keuangan, namun juga dalam pengembangan kapasitas dan kemampuan mahasiswa. "Hal ini diwujudkan dengan pemberian kesempatan magang di Bank BPD DIY bagi mahasiswa Amikom. Bank BPD DIY memberikan kesempatan kepada dunia pendidikan untuk bekerja sama dalam memperkaya pengalaman mahasiswa dalam bentuk magang kerja," kata Sumarno, Kamis (5/11).

Sumarno menuturkan, dunia perbankan tidak terlepas dengan pesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Demikian juga dengan Bank BPD DIY yang selalu melakukan inovasi di era digital ini. Sejumlah layanan berbasis digital telah berhasil diciptakan dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan. Sekaligus keamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi. "Sejumlah produk berbasis digital telah tercipta seperti E-posti, E-Retribusi, Cash Management System, EDC, Mobile Banking, QRIS dan lain sebagainya," imbuh Sumarno.

Sementara itu Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof Dr Mohamad Suyanto, MM mengucapkan terimakasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Bank BPD DIY selama ini. Kerja sama Bank BPD DIY dengan Amikom yang merupakan bentuk kolaborasi antara industri dan universitas untuk mewujudkan link yang saling menguntungkan. "Terimakasih kepada Bank BPD DIY semoga kedepannya kerja sama makin terjalin dengan baik," kata Suyanto. **(Aha)-f**

UNU Yogya Terima Bantuan dari Askrindo

KR-Devid Permana

Penyerahan bantuan Askrindo untuk UNU Yogya.

YOGYA (KR) - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta menerima bantuan dana sebesar Rp 250 juta dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero, untuk pembangunan kampus UNU yang baru. Bantuan diserahkan oleh Pemimpin Cabang Askrindo Yogyakarta Azhari Nur Kusumo diterima Rektor UNU Yogyakarta Prof Dr Purwo Santoso di Kantor Rektorat UNU Yogyakarta, Jalan Lowanu 47 Yogyakarta, Kamis (5/11).

Azhari mengatakan, bantuan ini merupakan program CSR dari Askrindo, sebagaimana yang diperintahkan Menteri BUMN, bahwa BUMN diminta untuk menyisihkan pendapatannya untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurut Azhari, penyaluran dana CSR Askrindo tidak hanya untuk UNU Yogyakarta saja, melainkan ada beberapa pihak yang juga mendapat dana CSR ini.

"CSR untuk UNU Yogyakarta diarahkan untuk mendukung persiapan pembangunan kampus baru UNU yang lebih representatif. UNU yang merupakan bagian dari NU menjadi prioritas karena kontribusinya yang besar kepada NKRI. **(Dev)-f**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman 55514 Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 4314/Peng.34.04-300/X/2020

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No.	Nama/ Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Desa c. Kec.	Keterangan
1.	MUHAMAD RINTO SUBEKTI Gerjen RT.006/RW.006 Margomulyo, Seyegan, Sleman	SHM No. 1879 SU No. 616/2000 Tgl : 06-01-2000 Luas : 658 M2	01307	MASHUDI	10-01-2000	a. - b. Margomulyo c. Seyegan	Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji Tgl. 20-10-2020
2.	MARIA LATIFAH Jl Urip Sumoharjo No.71 RT.046/RW.012 Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	SHM No. 3741 GS No. 2076/1995 Tgl : 01-02-1995 Luas : 311 M2	12154	MARIA LATIFAH	20-06-2016	a. - b. Maguwoharjo c. Depok	Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji Tgl. 20-10-2020
3.	YOHANES YOGA PRAMANA Ketingan RT.004/RW.021 Tirtoadi, Mlati, Sleman	SHM No. 3350 SU No. 1426/2000 Tgl : 27-01-2000 Luas : 193 M2	02562	SAMBIYA SUCIPTO	28-01-2000	a. - b. Tirtoadi c. Mlati	Surat Pernyataan di Bawah Sumpah/Janji Tgl. 20-10-2020

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

SEKRETARIS BP3S HARAPAN LUMBAN GAOL:

Ubah Pola Pikir, Tingkatkan Taraf Kehidupan Penerima PKH, Berikan yang Terbaik bagi Kementerian Sosial

KR-Istimewa

Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial BP3S Kemensos RI Harapan Lumban Gaol.

"APABILA perilaku KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak berubah, berarti PKH (Program Keluarga Harapan) tidak berhasil. Artinya pendamping gagal," kata Harapan Lumban Gaol, Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial BP3S Kemensos RI saat memberi arahan kepada para Peserta Diklat Family Development Session di Balai Diklat Kesos (BBPPKS) Yogyakarta, Kamis (5/11).

"Ubah pola pikir, tingkatkan taraf kehidupan Penerima PKH, berikan yang terbaik bagi Kementerian Sosial," pesannya.

Gaol meminta para pendamping saat kembali di lapangan dapat mengubah perilaku KPM menjadi hidup sehat dan mendapat pendidikan untuk mencapai kehidupan lebih baik. PKH diharapkan dapat memotong kemiskinan.

Menurut Gaol, PKH sebagai program utama Kemensos dan juga sudah dikenal dunia dapat menjadi parameter program (bantuan sosial) bersyarat dan dapat menjadi investasi dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurutnya, setiap KPM harus mendapat hak pendidikan dasar dan yang tidak kalah penting mendapat pelayanan kesehatan dasar. Pendamping PKH, jelas Gaol, harus memastikan para KPM mengecek kesehatannya ke fasilitas kesehatan dan memastikan anak-anak KPM mendapatkan hak pendidikannya melalui sekolah.

Masih menurut Sekretaris BP3S, Pendamping PKH harus bisa mengadvokasi hak-hak KPM. Walau tidak bisa menyelesaikan semua masalah KPM sendiri, namun Pendamping PKH harus bisa berhubungan dengan stakeholder terkait dan membantu KPM untuk memperoleh hak-haknya dan menyelesaikan permasalahan permasalahan KPM.

Ke depan, Indonesia harus bebas stunting, angka drop out menurun dan partisipasi sekolah meningkat. Pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan program keluarga harapan, diharapkan dapat menerapkan sungguh-sungguh ilmu yang didapat. "Semoga apa yang diajarkan dari balai dapat menjadi kekuatan baru bagi para pendamping." tutupnya.

Setelah mengikuti Diklat, selanjutnya para pendamping PKH akan mengikuti Ujian Kompetensi Sertifikasi. Semua pendamping harus punya sertifikat. Dengan sertifikat tersebut para pendamping PKH akan menjadi tenaga Kesejahteraan Sosial Tersertifikasi.

Diklat elearning FDS Pendamping PKH Gelombang 10 di BBPPKS Yogyakarta dilaksanakan secara virtual dari tanggal 3 sd 13 November 2020 melalui laman elearning.kemsos.go.id. Dengan peserta para Pendamping PKH dari Jawa Tengah Jawa Timur, NTT, NTB dan Bali. (*)